

KRITIK PETER L. BERGER TERHADAP KAPITALISME: MEMERANGI MITOS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KRISIS EKOLOGI DI INDONESIA

Stefanus Suriadi Jadur¹, Perseverando Giano Happy Putra², Joannes George Maria³,
Ewaldus Nuka⁴, Lorensius Syukur⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero

Email: stefanussuriadi2001@gmail.com¹, gianohappyputra@gmail.com²,
joeraga785@gmail.com³, nukaewaldus@gmail.com⁴, rhenghesch@gmail.com⁵

Abstrak: Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menjadi paradigma dominan dalam kebijakan pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Namun, paradigma ini kerap menghasilkan berbagai persoalan serius, seperti ketimpangan sosial, penderitaan manusia, dan krisis ekologi yang semakin akut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kritik Peter L. Berger terhadap kapitalisme pembangunan, khususnya mitos pertumbuhan ekonomi, serta relevansinya dalam membaca krisis ekologi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari karya-karya utama Peter L. Berger yang membahas politik pembangunan, mitos pertumbuhan, dan kalkulus penderitaan manusia, serta didukung oleh literatur teoritis dan data empiris terkait kerusakan lingkungan di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kritis-interpretatif untuk mengaitkan konsep-konsep Berger dengan realitas pembangunan kapitalistik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi telah mengabaikan dimensi etis pembangunan, sehingga melahirkan penderitaan manusia dan kerusakan ekologis yang sistemik. Kritik Berger menawarkan alternatif etika politik pembangunan yang berorientasi pada pengurangan penderitaan manusia (kalkulus penderitaan) dan penciptaan makna sosial (kalkulus makna), serta menempatkan manusia dan keberlanjutan lingkungan sebagai pusat kebijakan pembangunan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemikiran Peter L. Berger relevan sebagai landasan kritis dan normatif untuk merumuskan paradigma pembangunan yang lebih manusiawi dan ekologis di Indonesia.

Kata Kunci: Pembangunan, Kapitalisme, Mitos Pertumbuhan, Krisis Ekologi, Peter L. Berger.

Abstract: Development oriented toward economic growth has become the dominant paradigm in development policies in many Third World countries, including Indonesia. However, this paradigm has often generated serious problems such as social inequality, human suffering, and escalating ecological crises. This article aims to analyze Peter L.

Berger's critique of capitalist development, particularly the myth of economic growth, and its relevance for understanding Indonesia's ecological crisis. This study employs a qualitative approach using a library research method. The primary sources consist of Peter L. Berger's works on development politics, the myth of growth, and the calculus of human suffering, complemented by theoretical literature and empirical data on environmental degradation in Indonesia. Data analysis is conducted through a critical-interpretative approach, linking Berger's theoretical concepts with the realities of capitalist development in Indonesia. The findings reveal that development paradigms centered solely on economic growth tend to neglect the ethical dimensions of development, resulting in systemic human suffering and ecological destruction. Berger's critique offers an alternative framework of political ethics for development that emphasizes the reduction of human suffering (calculus of suffering) and the creation of social meaning (calculus of meaning), while placing human dignity and ecological sustainability at the core of development policies. This article concludes that Peter L. Berger's perspective remains highly relevant as a critical and normative foundation for formulating a more humane and ecologically responsible development paradigm in Indonesia.

Keywords: *Development, Capitalism, Myth of Economic Growth, Ecological Crisis, Peter L. Berger.*

PENDAHULUAN

Perbincangan tentang pembangunan, baik dari segi teoritis maupun praktis, terus berlanjut tanpa henti. Fenomena ini senantiasa beriringan dengan dinamika pembangunan yang tak pernah berhenti atau bahkan tak akan pernah berakhir. Pembangunan menjanjikan harapan baru untuk mengubah dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat (Kristeva, N. S. Y. 2015). Pembahasan mengenai pembangunan sebagai upaya merubah keadaan masyarakat mencakup bagaimana mengubah situasi yang sudah ada menjadi lebih baik. Pembangunan dianggap sebagai proses kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, politik, dan sosial, serta membawa harapan akan penyelamatan dan pembebasan.

Di negara-negara Dunia Ketiga, pembangunan yang menjadi pedoman tindakan, pemahaman, penilaian, serta solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi, tidak lagi memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh dominasi suatu paradigma tertentu dalam diskursus pembangunan, terutama paradigma pertumbuhan ekonomi yang

diukur dengan Pendapatan Nasional Per Kapita (GNP per kapita) (Fakih, M. 2008). Paradigma pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi melihat keberhasilan pembangunan suatu masyarakat atau negara dari tingkat pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi (Budiman, A. 2000). Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai kriteria utama dalam menilai keberhasilan pembangunan, yang menekankan pada aspek ekonomi seperti pendapatan dan keuntungan (Budiman, A. 2000). Saat ini, negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, mengalami krisis yang serius akibat kegagalan proyek pembangunan. Berbagai masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama muncul, seperti kemiskinan, kelaparan, penindasan, ketidakbebasan, kerusakan lingkungan, dan penderitaan. Situasi di negara-negara Dunia Ketiga tergambar suram, dengan perkiraan bahwa sekitar 800 juta orang hidup dalam kondisi kemiskinan mutlak.

Modernitas, industrialisasi, dan kapitalisasi merupakan tiga elemen yang beriringan dalam evolusi zaman. Proses modernisasi selalu membutuhkan industrialisasi sebagai motor penggerak utama. Untuk mendukung industrialisasi, eksploitasi berbagai sumber daya alam dilakukan secara besar-besaran. Hal ini sebagaimana yang diuraikan oleh W. W. Rostow (1959) dalam karyanya yang berjudul "The Stages of Economic Growth". Selanjutnya, untuk melakukan industrialisasi, modal yang cukup diperlukan sehingga pintu investasi harus dibuka lebar. Ketika investasi dibuka, tidak dapat dihindari bahwa dominasi oleh para pemilik modal akan terjadi dibandingkan dengan masyarakat lokal. Pada titik ini, ketimpangan sudah dimulai dan akan berlanjut menjadi proses dominasi.

Fakta menunjukkan bahwa tingkat kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat seiring dengan konsep modernitas yang berkembang. Di Indonesia, hal ini terlihat jelas dalam orientasi pembangunan, baik pada masa Orde Baru maupun Reformasi. Orde Baru secara tegas mengadopsi konsep modernitas ala W. W. Rostow dengan tahapan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian diimplementasikan dalam kebijakan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Konsekuensi dari adopsi konsep modernitas tersebut adalah berkembangnya industri dalam skala besar (Fakih, M. 2006). Untuk mendukung kebijakan ini, sumber daya alam dieksploitasi secara intensif untuk mendukung proses industrialisasi sebagai motor penggerak utama menuju terwujudnya

masyarakat modern. Konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari hal tersebut adalah kerusakan lingkungan hidup yang luas. Sebagai contoh, laju deforestasi selama masa pemerintahan Orde Baru terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan FAO, antara tahun 1976-1980, angka deforestasi mencapai 550.000 hektar per tahun. Angka ini terus meningkat, mencapai 1 juta hektar per tahun pada tahun 1980, 1,2 juta hektar per tahun pada tahun 1985, dan 1,7 juta hektar per tahun pada periode 1985-1997. Peningkatan laju deforestasi ini beriringan dengan peningkatan jumlah pemegang konsesi HPH di Indonesia (Hidayat, H. 2011). Sementara itu, pada masa Reformasi, angka deforestasi masih sangat tinggi, mencapai 3,52 juta hektar per tahun pada periode 1997-2000, dan 1,09 juta hektar per tahun pada tahun 2014-2015. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai penyumbang emisi gas karbon terbesar keenam di dunia (Müller, J. 2006). Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa modernitas, dengan landasannya pada rasionalitas, telah menjadikan alam sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi oleh manusia.

Pemikiran modernitas membawa manusia pada pandangan yang tidak hanya rasional, tetapi juga positif dan optimis. Alam dianggap sebagai sesuatu yang bisa dikendalikan oleh manusia dan selalu bisa ditaklukkan dengan berbagai terobosan teknologi untuk mengatasi masalah yang muncul. Namun, realitas menunjukkan bahwa kondisi alam semakin sulit diprediksi seiring dengan menurunnya daya dukung alam, mengancam tidak hanya generasi saat ini tetapi juga masa depan. Pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga dengan paradigma pertumbuhan ekonomi cenderung menyebabkan penderitaan bagi manusia. Hal ini terjadi karena negara-negara tersebut sangat fokus pada peningkatan pendapatan ekonomi atau produktivitas, sementara mengabaikan nilai kebebasan manusia atau biaya-biaya manusiawi. Akibatnya, manusia dianggap sebagai objek pembangunan, bukan subjek. Kritik terhadap ideologi pembangunan kapitalisme, yang diajukan oleh Peter. L. Berger, menyoroti apakah sistem tersebut benar-benar dapat mengatasi kemiskinan, ketertinggalan, dan ketidakbebasan, atau justru meninggalkan biaya-biaya manusiawi yang besar? (Müller, J. 2006).

Model pembangunan kapitalisme sering didasarkan pada mitos pertumbuhan (Müller, J. 2006). Ideologi tersebut menjanjikan masa depan cerah dengan mengorbankan banyak hal saat ini, tanpa bukti yang jelas bagi masa mendatang (Müller, J. 2006). Meskipun model ini dapat diperbaiki secara teoritis, kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali tidak menjamin kesejahteraan masyarakat secara merata, melainkan menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin membesar dan krisis ekologi yang akut. Pemecahan atas krisis-krisis pembangunan membutuhkan pemikiran etis yang mendalam. Kebijakan dan upaya pembangunan seharusnya bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia sebanyak mungkin dalam segala bentuk dan dimensinya. Dua konsep kunci yang harus diperhatikan dalam upaya pembangunan adalah Kalkulus Penderitaan dan Kalkulus Makna. Penderitaan manusia tidak boleh dipertaruhkan demi mencapai pertumbuhan atau janji-janji masa depan, melainkan harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Kebaruan tulisan ini terletak pada pendekatan teoritis dan analitis yang mengintegrasikan kritik etika politik Peter L. Berger dengan persoalan krisis ekologi di Indonesia, suatu perspektif yang belum banyak diangkat dalam penelitian empiris tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Sebagian besar studi terdahulu telah meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan di Indonesia melalui kerangka empiris ekonomi politik atau teori pembangunan berkelanjutan, seperti kajian hubungan antara pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi, dan kerusakan lingkungan yang menemukan hubungan positif antara ekspansi ekonomi dan degradasi ekologis serta perlunya kebijakan energi ramah lingkungan. (Sari, R. & Santoso, A. 2022) Penelitian lain menyoroti ancaman kapitalisme atau *meta-capitalism* terhadap ekologi dalam narasi pembangunan nasional seperti “Indonesia Emas 2045”, yang menunjukkan bahwa wacana pembangunan berkelanjutan bisa justru memperkuat eksploitasi sumber daya dan ketimpangan (Putri, D. 2021) Meskipun penting, pendekatan tersebut belum secara eksplisit memanfaatkan kerangka kritis teoritis dari seorang sosiolog seperti Berger untuk menguraikan bagaimana logika ideologis kapitalisme menanamkan mitos pertumbuhan yang menghasilkan penderitaan manusia dan kerusakan

lingkungan, serta bagaimana etika politik pembangunan Berger dapat menjadi alat normatif untuk membongkar asumsi-asumsi tersebut.

Selain itu, artikel ini menawarkan kebaruan dalam hal orientasi etika pembangunan sebagai alternatif paradigma kritik terhadap kapitalisme, yang tidak hanya berbicara tentang pola hubungan ekonomi-lingkungan secara empiris tetapi juga membedah struktur ideologis yang mendasari modernisasi dan pembangunan di Indonesia melalui lensa kalkulus penderitaan dan kalkulus makna. Penelitian lain yang melakukan refleksi filosofis terhadap krisis dan pembangunan seringkali berhenti pada kritik luas terhadap modernitas atau antroposentrisme dalam pembangunan berkelanjutan, seperti kajian yang menunjukkan bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia tetap terjebak dalam paradigma antroposentrisme dan utilitarianisme sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan (Wijaya, T. 2020). Dalam konteks ini, tulisan ini mengisi celah tersebut dengan menghadirkan kritik Berger yang secara sistematis menghubungkan teori sosiologi pembangunan dengan konteks spesifik Indonesia, sehingga tidak hanya menganalisis fenomena tetapi juga mengusulkan landasan etika politik yang dapat mendasari strategi kebijakan pembangunan yang lebih manusiawi dan ekologis. Dengan demikian, artikel ini memperluas ruang kajian akademik di persimpangan teori sosial, kritik ideologi kapitalisme, dan studi lingkungan di Indonesia secara konseptual dan normatif.

Pada tahap ini, menurut penulis, teori Pembangunan Peter L Berger layak digunakan sebagai landasan kunci untuk menerobos ide Pembangunan kapitalisme, dengan menunjukkan efektivitasnya dalam memerangi mitos pertumbuhan ekonomi dan krisis ekologi di Indonesia. Prinsip ini menjadi dasar ide pembangunan yang ideal di Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar adalah bagaimana peran konsep Pembangunan Peter L Berger dalam memberantas kecenderungan kapitalisme, secara khusus dalam hal mitos pertumbuhan ekonomi dan krisis ekologi di Indonesia?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai strategi utama pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada penelaahan kritis dan reflektif terhadap pemikiran Peter L. Berger mengenai kapitalisme, mitos pertumbuhan ekonomi, serta implikasinya terhadap penderitaan manusia dan krisis ekologi, khususnya dalam konteks pembangunan di Indonesia. Sumber data utama penelitian ini adalah karya-karya Peter L. Berger, yang secara eksplisit membahas politik pembangunan di Dunia Ketiga, mitos pertumbuhan, dan kalkulus penderitaan manusia. Karya-karya lain Berger yang relevan, serta literatur pendukung berupa buku teori pembangunan, kapitalisme, dan politik lingkungan, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga kredibel mengenai kerusakan ekologi di Indonesia digunakan sebagai sumber data sekunder untuk memperkuat analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dengan pendekatan kritis-interpretatif. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep kunci dalam pemikiran Berger, seperti mitos pertumbuhan ekonomi, mitos revolusi, kalkulus penderitaan, dan etika politik Pembangunan, serta menempatkannya dalam dialog dengan realitas empiris pembangunan kapitalistik dan krisis ekologi di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya memahami struktur konseptual dan logika pemikiran Berger secara mendalam, tetapi juga menilai relevansi dan daya kritis gagasannya dalam membongkar paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Dengan demikian, metode ini mendukung tujuan penelitian untuk merumuskan kritik teoretis terhadap kapitalisme sekaligus menawarkan etika politik pembangunan yang berpusat pada pengurangan penderitaan manusia dan keberlanjutan ekologis sebagai alternatif paradigma pembangunan di Indonesia (Moleong, L. J. 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Peter L. Berger dan Kritik Terhadap Kapitalisme**

Peter Ludwig Berger lahir pada tanggal 17 Maret 1929, di Wina, Austria, dari pasangan George William dan Jelka Berger. Orangtuanya adalah orang Yahudi yang berpindah agama menjadi Kristen. Setelah pengambilalihan Nazi terhadap Austria pada

tahun 1938, Berger dan keluarganya bermigrasi ke Palestina. Dia kemudian pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1946 pada usia 17 tahun. Berger belajar di Wagner College untuk gelar Sarjana Seni dan memperoleh gelar MA dan PhD dari New School for Social Research di New York pada tahun 1954 (dikutip dari https://en.m.wikipedia.org/wiki/Peter_L._Berger).

Berger memiliki karier yang gemilang sebagai sosiolog, berfokus pada sosiologi pengetahuan, sosiologi agama, studi modernisasi, dan kontribusi teoretis terhadap teori sosiologis. Dia terkenal atas karyanya yang berpengaruh "Pembangunan Sosial Realitas: Sebuah Kajian dalam Sosiologi Pengetahuan," yang ditulis bersama Thomas Luckmann pada tahun 1966. Buku ini memainkan peran penting dalam pengembangan konstruksionisme sosial (dikutip dari https://en.m.wikipedia.org/wiki/Peter_L._Berger).

Sepanjang kariernya, Berger mengajar di berbagai institusi termasuk The New School for Social Research, Universitas Rutgers, Boston College, dan Universitas Boston. Dia pernah menjadi direktur Institute for the Study of Economic Culture di Universitas Boston sebelum pensiun pada tahun 2009. Peter Ludwig Berger meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017, di rumahnya di Brookline, Massachusetts setelah berjuang melawan penyakit yang berkepanjangan.

Peter L. Berger, seorang sosiolog dan teolog terkemuka, menawarkan kritik yang berwawasan luas terhadap kapitalisme dan sosialisme dalam konteks pembangunan di Dunia Ketiga. Perspektifnya memberikan pencerahan tentang kelemahan inheren dan konsekuensi dari kedua ideologi ini terhadap kemajuan sosial (Berger, P. L. dan Luckmann, T. 1996).

Kritik Berger terhadap Kapitalisme dan Sosialisme dalam Pembangunan Dunia Ketiga Berger mengkritik baik kapitalisme maupun sosialisme atas dampaknya terhadap pembangunan di Dunia Ketiga. Dia menyoroti bagaimana kedua ideologi ini, ketika diterapkan pada perubahan sosial dan pembangunan, didasarkan pada mitos dominan pertumbuhan dan revolusi. Model-model pembangunan ini hadir dengan biaya bagi kemanusiaan, seringkali menghasilkan penderitaan yang harus ditanggung oleh individu.

Kritik Berger bertujuan untuk menantang pengaruh destruktif kapitalisme dan sosialisme terhadap pembangunan Dunia Ketiga.

Pandangan Berger tentang Pembangunan Menurut Berger, pembangunan harus bertujuan untuk membebaskan manusia dari penderitaan (Berger, P. L. 1976). Dia menekankan bahwa semua kebijakan dan upaya pembangunan harus berfokus pada mengurangi atau meminimalkan penderitaan manusia dalam berbagai bentuk dan dimensi. Pembangunan, menurut pandangan Berger, harus dimulai dengan mengatasi sumber-sumber konkret penderitaan manusia.

Peran Agama dalam Pembangunan menurut Berger Berger mengakui peran penting agama dalam upaya Pembangunan (Berger, P. L. 1976). Dia percaya bahwa agama memiliki posisi yang signifikan dan berfungsi sebagai bagian integral dari usaha manusia untuk membangun dunianya. Agama bertindak sebagai agen pemberi makna, memberikan legitimasi dan orientasi etis bagi individu yang berusaha hidup dalam dunia yang bermakna.

Usulan Berger untuk Etika Politik dalam Pembangunan Sebagai respons terhadap efek merugikan kapitalisme dan sosialisme, Berger mengusulkan sebuah etika politik untuk pembangunan. Kerangka etis ini bertujuan untuk membebaskan manusia dari penderitaan dengan memastikan bahwa semua kebijakan pembangunan dan inisiatif bekerja untuk mengatasi atau mengurangi penderitaan manusia dalam segala bentuknya.

Implikasi untuk Pemahaman Realistis tentang Pembangunan Dengan memperhatikan kritik dan usulan Peter L. Berger mengenai kapitalisme, sosialisme, agama, dan pembangunan, seseorang dapat memperoleh wawasan berharga tentang pendekatan alternatif untuk pembangunan Dunia Ketiga. Ide-idenya menawarkan perspektif yang nuansa tentang bagaimana kemajuan sosial dapat dicapai sambil memprioritaskan kesejahteraan manusia daripada sekadar pertumbuhan ekonomi semata.

2. **Pandangan Kapitalisme Secara Umum**

Kapitalisme berasal dari kata "kapital" yang berasal dari kata Latin "caput" yang berarti "kepala". Makna ini menjadi jelas, misalnya dalam istilah "pendapatan per kapita", pendapatan per kepala. Kemudian, kata "isme" mengacu pada "pemahaman", "ideologi":

suatu cara pandang atau cara hidup yang diterima oleh sekelompok besar orang dan oleh karena itu menjadi suatu konvensi. Sebenarnya mudah untuk mengartikan “kapitalisme”, begitu kita sepakat bahwa “modal” adalah “modal”. Kapitalisme adalah modalisme: pemahaman yang didasarkan pada modal. Beberapa sumber seringkali mengatakan bahwa kapitalisme sebagai sebuah ideologi harus dibedakan dengan kapitalisme sebagai sebuah fenomena (Jondar, A. et. al., 2022).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kapitalisme adalah suatu sistem dan pengertian usaha (ekonomi) yang modalnya (investasi, kegiatan industri) berasal dari modal monopoli atau modal perusahaan swasta, dengan memanfaatkan ciri-ciri persaingan dalam dunia usaha dan pasar bebas. Sejak memasuki masa reformasi, perkembangan kehidupan demokrasi (politik) di Indonesia mengalami kemajuan pesat, namun belum diikuti secara paralel dengan pertumbuhan sistem perekonomian kerakyatan.

Dengan demikian, arah sistem kapitalisme adalah upaya berkelanjutan untuk mengakumulasi uang melalui berbagai bidang kapitalistik. Dari sini juga dapat dipahami bahwa kapitalisme adalah suatu paham yang mempunyai 2 tujuan utama, yaitu pertama, akumulasi modal, dan kedua, proses penanaman modal atau perluasan modal (Jondar, A. et. Al., 2022).

3. Kapitalisme: Mitos Pertumbuhan Ekonomi dan Krisis Ekologi di Indonesia

Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada sekitar tahun 1990-an, wacana mengenai kapitalisme mulai meningkat. Kapitalisme menjadi semacam respons terhadap perkembangan global seperti globalisasi, developmentalisme, dan pasar bebas. Sejak bergabung dengan negara-negara ASEAN, Indonesia semakin mengokohkan dirinya dalam sistem ekonomi yang bergerak cepat menuju negara kapitalis. Tetapi, di antara negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia tetap terlihat enggan disebut sebagai negara kapitalis. Ini bisa dilihat dari isi Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa segala kekayaan yang berupa tanah adalah milik rakyat (Fadhilillah, M. N. 2022).

Penjarahan tanah di seluruh Indonesia telah menyebabkan bencana ekologis yang meluas di seluruh negeri. Dalam periode singkat lima bulan, dari 1 Januari hingga 31 Mei

2013, terdapat 776 bencana yang terjadi di 3.846 desa/kelurahan, 1.584 kecamatan, dan 311 kabupaten/kota (Fadhilillah, M. N. 2022). Bencana banjir mendominasi dengan 579 kejadian, diikuti oleh longsor sebanyak 129 kali, banjir rob 36 kali, banjir luapan danau 3 kali, banjir tanah dingin 3 kali, serta kombinasi banjir dan longsor sebanyak 26 kali, dengan total korban jiwa mencapai 346. Dampak jangka panjangnya diperkirakan semakin parah, di mana tidak ada provinsi di Indonesia yang terbebas dari bencana, seperti yang dilaporkan oleh Walhi. Di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur mengalami bencana alam terbanyak dengan 90 kejadian, yang melanda 637 desa/kelurahan, 195 kecamatan, dan 31 kabupaten/kota. Di sisi lain, Provinsi Yogyakarta hanya mengalami 2 kali banjir, menunjukkan tingkat kerusakan ekologis yang lebih rendah di sana. Di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan bencana ekologis tertinggi dengan 13 kejadian, yang melanda 203 desa/kelurahan, 43 kecamatan, dan 8 kabupaten/kota. Sedangkan Kalimantan Utara hanya mengalami 2 kali bencana di 8 desa/kelurahan, mungkin karena kondisi ekologisnya yang masih terjaga. Di semua wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, bencana alam umumnya disebabkan oleh kurangnya ruang terbuka. Faktor lain seperti minimnya drainase dan berbagai kondisi teknis di perkotaan serta alih fungsi lahan di pedesaan, terutama di dataran tinggi, turut memperparah dan memperluas dampak bencana. Penataan ruang yang tidak terkendali akibat penjarahan tanah dan alih fungsi lahan telah mengganggu keseimbangan ekosistem, menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Pola pengelolaan lingkungan yang buruk dan berdampak luas, seperti yang dijelaskan di atas, hanya merupakan salah satu contoh dari berbagai kasus serupa. Contoh lainnya dapat ditemukan dalam sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Eksploitasi tambang batubara tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Misalnya, tambang batubara di Kalimantan Timur telah menyebabkan kematian 31 orang antara tahun 2011 hingga 2018. Di sisi lain, ekspansi perkebunan sawit terus berlanjut pasca-Reformasi. Data dari Indonesia Palm Oil Statistic menunjukkan bahwa luas lahan sawit meningkat secara signifikan dari 6,59 juta hektar pada tahun 2006 menjadi 11,44 juta hektar pada tahun 2015 (Muthmainnah, L. et. al.,

2020). Kehadiran sawit yang memiliki nilai ekonomis tinggi menjadi penyebab utama konversi lahan hutan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Sumatera Utara.

Dalam era Reformasi, pemerintah mengubah pola pengelolaan lingkungan melalui pengesahan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diyakini lebih pro-rakyat dan pro-lingkungan. Namun, ketika UU ini bertabrakan dengan UU sektoral, fokus pembangunan yang masih menekankan pertumbuhan ekonomi menyebabkan esensi UU No. 32 tahun 2009 menjadi terkikis. Ketika terjadi konflik antara kelestarian lingkungan dan kepentingan ekonomi, keputusan utamanya cenderung menguntungkan aspek ekonomi, yang sering kali memicu konflik sosial. Selain itu, ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya masih terjadi di era Reformasi. Menurut data Walhi pada tahun 2017, dari total luas daratan dan laut Indonesia, sekitar 30,65% telah dialokasikan untuk investasi, dan sebagian besar (82,91%) dikuasai oleh korporasi, termasuk dalam sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan sawit (Muthmainnah, L. et. al., 2020).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan di Indonesia masih terkendala oleh tekanan pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada upaya menuju pembangunan berkelanjutan melalui UU No. 32 tahun 2009, dominasi korporasi dan oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam membuat implementasi aturan tersebut terhambat. Dampaknya adalah munculnya berbagai masalah lingkungan dalam skala besar. Data dari BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana dari tahun 2008 hingga 2017 disebabkan oleh faktor hidrometeorologi, menyoroti krisis ekologi yang mengancam Indonesia (Muthmainnah, L. et. al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap pendekatan modern dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, dengan harapan dapat menciptakan peluang yang lebih baik di masa depan.

4. Konsep Pembangunan Peter L. Berger: Strategi Kritis Memerangi Kapitalisme di Indonesia

Peter L. Berger secara konsisten mempertanyakan model logika kapitalisme dalam kritiknya. Baginya, upaya pembangunan dan kebijakan seharusnya difokuskan pada

pengurangan penderitaan manusia dalam segala bentuk dan dimensinya. Berger mengkritik peran dominan industrialisasi dan kapitalisme dalam krisis ekologi, serta menyoroti keterbatasan paradigma pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi.

Berger menekankan bahwa evaluasi kemajuan suatu negara tidak bisa hanya diukur dari segi kemakmuran atau keberhasilan proses perkembangan masyarakatnya saja. Indikator-indikator tradisional kemajuan seperti pertumbuhan ekonomi memiliki keterbatasan yang sering kali diabaikan. Dalam pandangan Berger, paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi cenderung mengabaikan penderitaan manusia dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari kebijakan yang diterapkan.

Dengan demikian, Berger menekankan perlunya mempertimbangkan dimensi-dimensi kemanusiaan dan ekologis dalam proses pembangunan. Upaya pembangunan haruslah memperhatikan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, tanpa mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan. Berger menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan yang diterapkan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, pembangunan selalu berupa “Pembangunan dari bawah”. Dalam membangun sebuah masyarakat yang sejahtera, prinsip utama yang harus dipegang teguh adalah bahwa pembangunan selalu harus dimulai dari bawah. Hal ini menegaskan bahwa penderitaan manusia, baik itu terkait dengan pengalaman negatif seperti kematian, ketakutan, atau penderitaan fisik, tidak boleh diabaikan atau dipertaruhkan demi mencapai tujuan pembangunan. Dalam pandangan ini, manusia bukan hanya objek, tetapi juga subjek utama pembangunan. Oleh karena itu, upaya dan kebijakan pembangunan haruslah berpusat pada mengurangi dan mencegah penderitaan yang harus ditanggung oleh manusia (Berger, P. L. 1976).

Penderitaan fisik, seperti kelaparan atau teror, dianggap sebagai bentuk penderitaan yang paling mengerikan dan tidak dapat diabaikan. Pembangunan yang benar-benar

berorientasi pada kesejahteraan manusia harus memprioritaskan pengalaman manusia dalam menghadapi penderitaan. Artinya, dalam merancang strategi pembangunan, kita harus mempertimbangkan dan meminimalkan penderitaan yang dialami oleh masyarakat, terutama yang paling rentan dan terpinggirkan. Dengan kata lain, pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan usaha untuk mengatasi penderitaan manusia.

Untuk mencapai hal ini, penting untuk menggeser fokus pembangunan dari pertumbuhan ekonomi semata ke peningkatan kesejahteraan manusia. Parameter keberhasilan pembangunan harus mencakup aspek-aspek seperti kualitas hidup, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Ini berarti bahwa partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi sangat penting, karena mereka memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan merancang solusi yang tepat.

Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia juga harus bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Semua orang harus memiliki hak yang sama untuk hidup dalam martabat dan kebebasan. Selain itu, perlindungan lingkungan dan keseimbangan ekologi juga tidak boleh diabaikan dalam upaya pembangunan, karena keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan sangat penting untuk keberlanjutan masa depan.

Kedua, Sistem kapitalisme, dengan fokus utamanya pada pertumbuhan ekonomi, sering kali mengesampingkan dampak negatif terhadap lingkungan dan penderitaan manusia. Dalam logika kapitalis, faktor-faktor produksi digunakan semata-mata untuk mencapai keuntungan maksimal, tanpa memperhitungkan biaya sosial atau kerusakan ekologis yang timbul sebagai akibatnya. Perusahaan-perusahaan cenderung mengeksploitasi sumber daya alam seperti hutan, tanah, dan air secara berlebihan demi keuntungan ekonomi yang cepat. Hasilnya adalah deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran air yang merugikan masyarakat lokal dan ekosistem (Berger, P. L. 1976).

Modernisasi dan industrialisasi yang terus berlanjut dalam sistem kapitalis memicu krisis ekologis yang tak terhindarkan. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam kerangka kapitalisme seringkali kurang peduli terhadap kesejahteraan pekerja atau

keharmonisan dengan lingkungan. Mereka lebih memperhatikan pencapaian nilai tukar maksimal dengan biaya produksi minimal. Oleh karena itu, teknologi sering digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya produksi, tanpa memperhitungkan konsekuensi lingkungan yang mahal.

Dalam sistem kapitalisme, kontrol atas sumber daya dan ekspansi ke pasar global menjadi prioritas bagi perusahaan yang ingin bertahan. Pencapaian keuntungan lebih diutamakan daripada pelestarian keseimbangan ekologis atau kesejahteraan manusia (Muthmainnah, L. et. al., 2020). Hal ini mengakibatkan pengrusakan lingkungan yang tidak hanya merugikan saat ini, tetapi juga membawa dampak jangka panjang yang tidak dapat diprediksi secara pasti.

Dengan demikian, kapitalisme telah menciptakan paradoks di mana keuntungan ekonomi diperoleh dengan biaya penderitaan manusia dan kerusakan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya tidak berkelanjutan, tetapi juga tidak etis. Untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan manusia serta lingkungan, diperlukan paradigma pembangunan yang lebih holistik dan bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.

Ketiga, Kapitalisme sering kali mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas, tanpa memperhitungkan batasan-batasan ekologis yang ada. Fokus utama pada pertumbuhan tanpa batas ini dapat mengakibatkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan degradasi lingkungan, mengancam tidak hanya kelangsungan hidup manusia, tetapi juga spesies lainnya.

Meskipun kapitalisme sering dipuji karena efisiensinya dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi, namun sering kali kurang memperhitungkan biaya eksternal, terutama kerusakan lingkungan, yang tidak tercermin dalam harga pasar. Dalam sistem ini, keuntungan ekonomi yang dikejar mungkin tercapai atas biaya kerusakan ekologi, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang merugikan bagi masyarakat dan lingkungan.

Dengan kata lain, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, kapitalisme dapat mengabaikan nilai-nilai lingkungan dan kesejahteraan jangka

panjang. Penekanan pada pertumbuhan tanpa batas ini seringkali mengesampingkan urgensi untuk menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, kapitalisme dapat terjebak dalam siklus di mana eksploitasi sumber daya alam terus berlanjut tanpa pertimbangan yang memadai terhadap konsekuensi jangka panjangnya. Dalam hal ini, perlunya refleksi kritis terhadap model ekonomi yang terus-menerus mengejar pertumbuhan tanpa batas menjadi semakin mendesak, guna menjamin keberlangsungan hidup manusia dan planet ini dalam jangka panjang.

Keempat, Sistem kapitalisme secara konsisten memperkuat ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial yang signifikan. Dampaknya tidak hanya terasa pada tingkat ekonomi, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan dampak lingkungan. Kelompok masyarakat yang lebih miskin atau rentan sering kali menjadi korban utama dari kerusakan lingkungan, seperti kehilangan mata pencaharian tradisional akibat rusaknya habitat atau terpapar polusi yang merugikan kesehatan.

Dalam kapitalisme, keputusan ekonomi cenderung didasarkan pada pertimbangan keuntungan individual atau perusahaan, tanpa memperhitungkan kesejahteraan bersama dan keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, masyarakat secara keseluruhan dapat menderita akibat keputusan yang hanya menguntungkan sebagian kecil individu atau kelompok.

Industrialisasi, sebagai aspek penting dalam kapitalisme, seringkali hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok, sementara menimbulkan biaya eksternal yang besar bagi masyarakat luas. Proses ini menciptakan ketidakseimbangan distribusi manfaat dan risiko antara pemilik modal dan masyarakat local (Muthmainnah, L. et. al., 2020). Hal ini menciptakan dominasi kelompok manusia tertentu atas yang lain, yang pada gilirannya memperkuat dominasi manusia terhadap alam. Ketidakseimbangan ini berpotensi merusak ekosistem dan mengancam stabilitas alam.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal atas sumber daya alam, pengembangan kebijakan yang memperhitungkan

kesejahteraan bersama, dan memastikan bahwa industrialisasi berjalan sejalan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan manusia secara luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peter L. Berger menyoroti pentingnya menggeser fokus pembangunan dari pertumbuhan ekonomi semata ke kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus memprioritaskan pengurangan penderitaan manusia dalam segala bentuk dan dimensinya, sambil memperhatikan keseimbangan ekologis. Tulisan ini menggambarkan kritik yang tajam terhadap model kapitalisme dalam konteks pembangunan manusia dan lingkungan.

Berger mempertanyakan logika kapitalisme yang sering kali mengabaikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan manusia, serta menyoroti ketidaksetaraan sosial yang diperkuat oleh sistem ini. Ia menekankan perlunya mempertimbangkan dimensi-dimensi kemanusiaan dan ekologis dalam proses pembangunan, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, tulisan ini mengajukan seruan untuk adopsi paradigma pembangunan yang lebih holistik dan bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Hal ini membutuhkan refleksi kritis terhadap model ekonomi yang terus menerus mengejar pertumbuhan tanpa batas, serta upaya bersama untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan demi menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua makhluk di bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, P. L. (1976). *PYRAMIDS OF SACRIFICE: Political Ethics and Social Change*. New York: Anchor Press.
- Berger, P. L. & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Doubleday.
- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Fakih, M. (2006). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Fakih, M. (2008). *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, H. (2011). *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Jondar, A. et. al. (2022). Understanding Max Weber's Thoughts on Capitalism in Indonesia. *International Journal of Social Science (IJSS)* 1(6).
- Müller, J. (2006). *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muthmainnah, L. et. al. (2020). Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Mozaik Humaniora* 20(1).
- Fadhilillah, M. N. (2022). Kapitalisme dan Terjadinya Penjarahan Tanah di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5(2).
- Kristeva, N. S. S. (2015). *Kapitalisme, Negara Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sari, R. & Santoso, A. (2022) Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Degradasi Lingkungan di Indonesia: Analisis Empiris 2000–2020, *Jurnal Ilmiah Energi dan Lingkungan*, hlm. 45–67,
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ijred/article/view/37822>.
- Putri, D. (2021). Kapitalisme dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap “Indonesia Emas 2045. *Jurnal Serunai*, hlm. 12–29,
<https://jurnal.idfos.or.id/index.php/serunai/article/view/82>.
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyad, S. (2021). Problem Intrinsik Dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Filsafat Politik Terhadap Pengelolaan Lingkungan di Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal Wacana Politik*, 6(1), hlm. 62-75,
<https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/27801>